



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIK SRIHARTATI
2. Jabatan : HAKIM AD-HOC
3. NHK : 112603

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.517.780.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 161.100.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 210.600.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 216.720.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 977 m2/70 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 451.920.000
5. Tanah Seluas 1150 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 73.600.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/196 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 451.920.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/150 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 451.920.000
8. Tanah Seluas 200 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 470.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINI BUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 9.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	569.708.923
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.566.488.923
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.566.488.923

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.